

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul pada Bab pembahasan skripsi ini, dapatlah ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan praktik politik uang (*money politic*) pada pilkada tahun 2020 di Kabupaten Dharmasraya oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga integritas proses demokrasi. Bawaslu Kabupaten Dharmasraya telah melaksanakan berbagai upaya preventif dan represif untuk mengatasi praktik *money politics*, termasuk sosialisasi kepada peserta pemilihan dan masyarakat, serta penyampaian imbauan kepada para stakeholder terkait. Selain itu, Bawaslu juga melakukan patroli pengawasan dan menjalin kerjasama dengan media massa dan instansi terkait untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengawasan. Melalui langkah-langkah tersebut, Bawaslu berusaha memastikan pelaksanaan Pilkada yang bersih, jujur, dan adil di Kabupaten Dharmasraya.
2. Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengawasan praktik politik uang (*money politic*) pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Dharmasraya berfokus pada peningkatan sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang bahaya *money politics* serta memperkuat mekanisme pelaporan dan penanganan kasus. Kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan minimnya informasi diatasi melalui kerja sama dengan media, kepolisian,

kejaksaan, dan instansi terkait lainnya. Bawaslu juga memperkuat kapasitas internal melalui pelatihan dan pembinaan, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif dan adil.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang akan penulis jabarkan diantaranya sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Bawaslu Kabupaten Dharmasraya untuk meningkatkan program pendidikan politik yang menekankan bahaya dan dampak negatif dari praktik *money politics* kepada masyarakat. Program ini harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai media, termasuk sosial media, untuk memastikan pesan tersebut dapat dipahami dengan baik oleh semua kalangan.
2. Disarankan kepada pemerintah daerah untuk memperkuat regulasi dan sanksi terhadap praktik *money politics* serta memberikan dukungan penuh kepada Bawaslu dalam upaya penegakan hukum. Pemerintah juga perlu memastikan adanya alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan pengawasan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu.
3. Disarankan kepada masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pengawasan pemilihan dan tidak segan-segan melaporkan setiap indikasi praktik *money politics* yang mereka temui. Masyarakat juga perlu terus meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya memilih berdasarkan program dan visi misi calon, bukan karena pemberian materi atau uang.